

ANALISIS PENERAPAN SMART GOVERNANCE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muhammad Raihan Fachrurozy
NPP. 30.1352

*Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Fakultas Manajemen Pemerintahan*

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The development of government digitalization is very helpful in the process of serving the community. Many factors influence the use and development of an electronic-based government system. In Kendari City there are public service applications and websites, but the level of Electronic-Based Government System based on evaluation results from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia, Public service applications and websites in Kendari City are also still accessible by the people of Kendari City . Currently, the Kendari City government is still in the process of implementing smart governance but does not yet have an analysis of the extent to which smart governance is implemented. So in this study the researcher took the title Analysis of the Implementation of Smart Governance in the Office of Communication and Information, Kendari City, Southeast Sulawesi Province.*

Purpose: *This study aims to analyze the process of implementing smart governance whether it has been going well or vice versa. To examine the problems in this study, researchers used Giffinger's theory to analyze the process of implementing smart governance through 4 dimensions, namely community participation, public service, transparency and political perspective and strategy.*

Method : *This research was conducted using a descriptive qualitative method.*

Result: *The results of the research conducted show the implementation of smart governance in Kendari City with several efforts made by the government in order to realize smart governance, namely by providing a public service website application, efforts to socialize services to the community regarding digitization of services, and increasing SPBE.*

Conclusion: *It can be concluded that it is necessary to increase outreach to the community so that the use of public service website applications can be carried out effectively and efficiently and in the process of implementing smart governance in Kendari City, support is needed in carrying out government policies in order to achieve the goals of good governance*

the implementation of smart governance in Kendari City in general has been going well. Of the four indicators according to Giffinger's smart city theory, two indicators, namely Transparency and Infrastructure for social public services, have been going well and supporting the implementation of smart governance in Kendari City.

Keywords: *application, smart governance, public service*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan digitalisasi pemerintahan sangat membantu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Di Kota Kendari telah ada aplikasi maupun website pelayanan publik namun tingkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Aplikasi maupun website pelayanan publik di Kota Kendari juga masih ada yang tidak dapat di akses oleh masyarakat Kota Kendari. Saat ini masih pemerintah Kota Kendari sedang dalam proses penerapan smart governance tetapi belum memiliki analisis sejauh apakah penerapan smart governance ini diterapkan. Maka pada penelitian ini peneliti mengambil judul Analisis Penerapan Smart Governance di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** untuk menganalisis proses penerapan smart governance apakah telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Giffinger untuk menganalisis proses penerapan smart governance melalui 4 dimensi yaitu partisipasi masyarakat, Pelayanan Publik, Transparansi dan Perspektif dan Strategi Politik. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan penerapan smart governance di Kota Kendari dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan smart governance yaitu dengan adanya penyediaan aplikasi website pelayanan publik, upaya dalam melukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai digitalisasi pelayanan, dan peningkatan SPBE. **Kesimpulan:** Dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan aplikasi website pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dalam proses penerapan smart governance di Kota Kendari diperlukan dukungan dalam menjalani kebijakan pemerintah agar dapat mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik Penerapan smart governance di Kota Kendari secara umum sudah berjalan dengan baik. Dari empat indikator menurut teori smart city giffinger, dua indikator sudah berjalan dengan baik yaitu, Transparansi dan Infrastruktur pelayanan publik sosial sudah berjalan dengan baik serta mendukung penerapan smart governance di Kota Kendari

Kata kunci: Penerapan, Smart Governance, Pelayanan Publick

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sudah memulai untuk menerapkan sistem pemakaian teknologi informasi dan komunikasi demi menerapkan pengelolaan pelayanan publik yang jauh lebih efisien dan efektif serta mempermudah akses publik untuk meraih informasi sehingga Negara Indonesia mulai membangun sistem informasi yang diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pemberian layanan kepada masyarakat oleh pemerintah.

Smart City memang sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun Smart City adalah sebuah langkah yang hebat dalam

memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harafiah, Smart City memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif

Smart city sendiri apabila di pandang berdasarkan penggunaan bahasa maka kata *smart city* memiliki makna “kota cerdas” yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan segala macam aktivitas yang di lakukan sehari hari, sejalan dengan hal itu tujuan utama adanya *smart city* yaitu agar membuat ketersediaan berbagai sumber daya dapat digunakan dengan efektif. Pengertian lain dari *Smart city* ialah kota yang dapat menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk menerapkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis komunitas untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas tinggi. *Smart city* berkembang mulai sejak tahun 2000-an. Awalnya, *smart city* lebih di fokuskan kepada pengembangan sistem infrastruktur dan transportasi yang efisien dengan tujuan mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia sendiri *smart city* ialah sebuah langkah dengan menerapkan perubahan dalam kehidupan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) melalui digital, internet dan online.

Kota Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 301,00 Ha. Kota Kendari memiliki 10 kecamatan dan 64 kelurahan. Visi Kota Kendarii adalah Menjadikan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang berdasarkan ekologi, informasi dan teknologi, serta memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan menata wajah kota. Berdasarkan hal tersebut maka Kota Kendari di canangkan akan menjadi kota masa depan dunia karena kekayaan alamnya yaitu bahan utama baterai yakni nikel.

Demi menekan peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja atau metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut. Indeks SPBE ialah proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan maupun kendala dapat diminimalisir. Dalam menjalankan itu semua pemerintah selaku pelaksana mampu mengelola manajemen pemerintahan guna terwujudnya pelayanan secara cepat, efisien, responsif, komunikatif, dan tentunya dibarengi dengan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi. Saat ini beberapa Badan, Dinas maupun Lembaga Pemerintahan telah menerapkan konsep tersebut dalam menjalankan suatu pelayanan maupun perumusan kebijakan. Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Diantaranya membangun *website* Pemerintah Kota. Oleh karena itu, analisis dilakukan pada *website* pemerintah Kota Kendari yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Kendari, serta memilih Diskominfo Kota Kendari sebagai instansi lokus pada penelitian ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Problematika dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Kendari, mendorong Pemerintah Daerah membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari sejak tanggal 14 Juli 2015. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan sampah yang terjadi di Kota Kendari. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah juga dilakukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan terkait waktu pembuangan sampah yang lebih disiplin. Namun upaya tersebut belum dianggap cukup mengingat masih banyak wilayah di Kota Kendari yang belum mendapatkan pelayanan secara rutin, termasuk dengan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Masalah pengelolaan sampah di Kota Kendari tentunya juga menjadi tanggung jawab masyarakat Kota Kendari, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab penanganan kebersihan dan lingkungan perlu mengatasi masalah tersebut secara lebih efektif kedepannya agar pengelolaan sampah di Kota Kendari tidak akan menjadi masalah beban berat bagi negara dan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya oleh Annisa Rahmadanita, Eko Budi Santoso, dan Sadu Wasistiono tahun 2018 berjudul *Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart city Di Kota Bandung*. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. Metode yang digunakan Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung secara umum memberikan dampak yang positif bagi target groups (kelompok sasaran). Context of implementation) menunjukkan kondisi yang tidak baik sementara Content of policy (isi kebijakan) menunjukkan kondisi yang baik. Pada penelitian ini faktor content of policy lebih berpengaruh terhadap hasil daripada faktor context of implementation. Oleh karena dalam pengimplementasian kebijakan smart government di Kota Bandung lebih dipengaruhi oleh content of policy daripada context of implementation.

Hasil penelitian terdahulu yang kedua dari Indrawati dan Febrianta tahun 2020 berjudul *Identification of e-governement indicators for measuring smart governance in Bandung city* dengan Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 12 variabel dan 13 indikator dalam penerapan smart governance di Kota Bandung yang digunakan untuk mengukur kesiapan Kota Bandung dalam penerapan smart governance.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu Lokus penelitian terletak di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Serta Pembahasannya lebih luas mengenai *smart city*.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan smart governance apakah telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Giffinger untuk menganalisis proses penerapan smart governance melalui 4 dimensi yaitu partisipasi masyarakat, Pelayanan Publik, Transparansi dan Perspektif dan Strategi Politik.

II. METODE

Dalam suatu penelitian objek penelitian dalam penelitian kualitatif ialah bersumber pada masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif lebih condong terhadap persepsi dan pengalaman dari informan. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan *Smart governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kendari secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat menjelaskan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *smart governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kendari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah berupa pertanyaan yang ada pada Bab 1 yaitu Bagaimana Analisis Penerapan *Smart governance* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan visi Kota Kendari yakni sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi maka Sejak Kepemimpinan H. Sulkarnain K, SE, ME dan dr. Hj. Siska Karina Imran, Periode 2017-2022, berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti program berbasis teknologi dan informasi. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipacu untuk membuat program pelayanan masyarakat berbasis informasi dan teknologi, diantaranya Layanan Integrasi Kendari atau LAIKA, layanan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Humas, SiCantik Cloud yakni aplikasi yang mempermudah layanan pada pengurusan izin dan usaha dengan sistem teknologi informasi dan pelayanan satu pintu, e- signature, e-SPPD, SimpleSP2D, SIMSETGIS (Sistem Manajemen Informasi Aset Berbasis GIS), E-Planning, E- Monev, SIMPER (Sistem Informasi Persuratan) aplikasi mempermudah proses administrasi persuratan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Daerah), JARI (Jaga Kendari) , TP-PNS, SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIP-PAD, SIMANTAP.

Sejalan dengan program digitalisasi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Kendari juga terus berbenah pada program fisik. Sejak awal tahun 2019 Walikota Kendari H. Sulkarnain K, SE., ME. telah menuntaskan dan membebaskan lahan peruntukan jalan serta merevitalisasi kawasan pedestrian, melakukan normalisasi kali serta saluran air (drainase). Melalui program Bina Marga, Cipta Karya dan SDA, Pemerintah Kota kendari terus meningkatkan jalan di beberapa kawasan dalam kota, diantaranya jalan kawasan Mandonga, Jalan Kawasan Kambu-Poasia, dan Jalan Kawasan Kambu-Poasia-Nambo.

Konsep *Smart city* dasarnya mengacu atas enam indikator dalam pengembangannya. Yaitu: *Smart governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, Dan Smart Branding*. Regulasi yang mengatur tentang *Smart city* adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dalam Bab XXI bertajuk inovasi daerah, dari pasal 386 hingga pasal 390.

Pada penerapan *smart city*, ada beberapa unsur yang sementara dikembangkan dan diterapkan di Kota Kendari, salah satunya adalah *Smart governance*.

Smart governance ialah salah satu indikator dari penerapan konsep *smart city*. *Smart governance* menjelaskan agar pemerintah memanfaatkan teknologi terpadu dalam sistem pengelolaan pelayanan publik maupun merumuskan kebijakan. Ada empat dimensi pada *Smart governance* yaitu: (1) Pengambilan keputusan Partisipatif / *Participation in decision making*, ialah proses pemberian kepemilikan keputusan kepada seluruh kelompok secara kreatif dengan menemukan pilihan yang efektif untuk dijalankan semua orang. (2) Pelayanan Publik dan Sosial / *Public and Social Services*, Pelayanan sosial meliputi tunjangan dan fasilitas seperti perawatan kesehatan, bantuan makanan, pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, perumahan bersubsidi, perawatan kesehatan, adopsi, pelatihan kerja, lobi, penelitian kebijakan, dan pengelolaan masyarakat. (3) Tata Kelola Transparan / *Transparent Governance*, pejabat pemerintah tidak menyembunyikan apapun terhadap masyarakat dan bertindak secara terbuka dengan diketahui oleh warga negara terkait keputusan yang akan diambil. (4) (Perspektif dan strategi politik/ *Political Strategis & Perspective*, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan baik dari segi pengaruh maupun kredibilitas untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi konflik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Kendari telah menerapkan dimensi *Smart governance* yaitu penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.1 Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan

Pada penelitian Ramdhani(2017) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat selain untuk percepatan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Dalam hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kota Kendari sudah ikut serta dalam menjalankan kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan teknologi, Hal ini dibuktikan dengan data statistik dimana pengunjung website resmi Pemerintah

Kota Kendari rata-rata hanya berjumlah 20 pengunjung per harinya. Faktor operasional lain yang perlu dilihat adalah website resmi Pemerintah Kota Kendari masih belum terintegrasi dengan dinas-dinas maupun badan-badan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Kendari sehingga membuat pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang dinas maupun badan tersebut.

2) Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan Partisipatif merupakan proses pemberian kepemilikan keputusan kepada seluruh kelompok secara kreatif dengan menemukan pilihan yang efektif untuk dijalankan semua orang.

Dari keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota kendari masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah sehingga dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat belum sepenuhnya merata dengan baik.

3.2 Pelayanan Sosial

1) Infrastruktur pelayanan publik social

Adanya infrastruktur dapat memberikan dampak yang begitu besar dalam hal penerapan *smart governance*. Dengan adanya Infrastruktur yang optimal maka dapat mendukung proses penerapan *smart governance* dengan baik. Infrastruktur dapat diukur dengan melihat komponen infrastruktur yang terpasang dengan *wifi*, *Broadband* dan sensor, serta dengan meninjau bagaimana layanan yang terintegrasi dalam satu layanan terpadu terutama untuk pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat kota.

- 2) Layanan aplikasi pelayanan publik yang tersedia
- 3) Akses masyarakat dalam pelayanan pemerintah
- 4) Penggunaan dan pemanfaatan TIK

3.3 Transparansi

1) Penyediaan informasi pemerintah Kota Kendari

Pemerintahan yang transparan berarti pejabat pemerintah tidak menyembunyikan apapun terhadap masyarakatnya serta bertindak secara terbuka dengan diketahui oleh warga negara terkait keputusan yang akan diambil.

Masyarakat sering dihadapkan dengan situasi yang dimana mereka sulit ketika mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelaksana layanan. Masalah transparansi ini juga pada akhirnya tidak hanya mempersulit akses masyarakat akan pelayanan publik, namun juga mengurangi kualitas pelayanan publik itu sendiri.

2) Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan untuk mencegah korupsi

Sejumlah pihak baik penegak hukum hingga kepala daerah mengklaim bahwa penerapan *smart governance*, e-gov, atau pun digitalisasi pelayanan publik bisa efektif menggerus praktik korupsi. Dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada saat ini, keyakinan meng-online-kan birokrasi sebagai obat yang ampuh dalam mengurangi korupsi harus diuji kembali. Beberapa kasus itu antara lain Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di kota yang masuk dalam daftar kota/kabupaten di Indonesia yang dipersiapkan menuju *smart city*.

Kota Kendari sendiri telah mengadopsi *E-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kota Kendari telah menjalankan program transparansi kepada masyarakat sehingga dengan adanya aplikasi e-PROKSI ini masyarakat dapat mengakses dan menerima layanan APIP tanpa lagi harus datang ke kantor dan juga dapat mengendalikan tindak korupsi.

3.4 Perspektif dan strategi politik

1) Dasar Kebijakan Penerapan *Smart governance*

Strategi politik menurut Annisah (2017), terbagi dalam indikator Penguatan sistem informasi di DPRD, Integrasi sistem informasi antara DPRD dengan pemda, dan Sistem pengambilan kebijakan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa strategi politik dalam memutuskan suatu kebijakan melalui rapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Kendari. Jika suatu usulan program dianggap sesuai dengan kepentingan dan anggarannya mencukupi maka akan disahkan. Namun sebaliknya jika tidak sesuai maka akan dibatalkan. Sama halnya dengan pengambilan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat masih kurang. Bahkan masih terdapat kepentingan tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Tentu ini adalah persoalan klasik yang masih menjadi konsumsi public dan harus diatasi jika mengacu pada konsep *Smart governance*.

2) Perspektif Pemerintah Terhadap *Smart governance*

Perspektif Strategi politik dalam merumuskan kebijakan adalah Penguatan sistem informasi di DPRD, Integrasi sistem informasi antara DPRD dengan Pemda, dan Sistem pengambilan kebijakan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan relasi masih menjadi permasalahan yang sampai saat sering terjadi. Ditambah lagi dengan minimnya komunikasi masyarakat dengan anggota DPRD masih sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan yang akan disepakati nantinya.

Dari indikator partisipatif dan strategi politik dalam merumuskan kebijakan dan penetapannya masih erat kaitannya dengan adanya ketidakadilan. Karena masih sering terjadi aspirasi masyarakat yang tidak diperhatikan. Hal ini yang membuat belum tercapainya perumusan kebijakan yang baik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan kebijakan Smart Governance memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka pemberian informasi pelayanan publik. Kebijakan smart governance di Kota Kendari ini juga bisa dijadikan sebagai role model bagi wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis menemukan temuan penting yakni penerapan smart governance di Kota Kendari sudah berjalan dengan cukup baik dimana pemerintah diwakili oleh Diskominfo telah menerapkan konsep Smart Governance dalam berbagai hal mengenai pemberian informasi publik sama halnya dengan perbandingan penerapan Smart Governance di Indonesia pada studi kasus Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan *Smart city* Di Kota Bandung (Annisa Rahmadanita, Eko Budi Santoso, dan Sadu Wasistiono/ 2018) dimana

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa implementasi Smart City telah diaplikasikan dengan baik yakni dengan diterapkannya smart people di Kota Bandung telah mempunyai kontestasi indeks pengembangan SDM. Layaknya kebijakan lainnya, kebijakan Smart Governance Kota Kendari ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya belum maksimal karena faktor berikut ini yaitu sumber daya, komunikasi, sikap, serta struktur birokrasi. Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu memberikan pelayanan yang maksimal dari pemerintah lewat Diskominfo kepada masyarakat Kota Kendari agar indikator Smart Governance dapat berjalan dengan baik dan terealisasi secara keseluruhan. Kemudian pada open government, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmennya melalui Portal Kendari.go.id dan aplikasi lainnya yang berguna untuk pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Penerapan Smart Governance Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Kota Kendari dalam menjalankan kebijakan pemerintah secara umum sudah berperan aktif menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari meskipun masih belum merata yang dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat serta dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada masyarakat yang belum begitu paham akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari dalam aspek infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Kota Kendari sedang membenahi infrastruktur pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di lingkup pemerintahan Kota Kendari yang kini sudah mengarah pada era digitalisasi dan juga pemerintah Kota Kendari sudah menyediakan aplikasi dan website pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Kendari namun masih terdapat golongan masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi website pelayanan publik tersebut kemudian dalam hal Penyediaan informasi pemerintah Kota Kendari secara umum sudah baik karena segala informasi pemerintahan dapat diakses melalui website *kendarikota.go.id* sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Kota Kendari kemudian dalam hal pencegahan korupsi, pemerintah Kota Kendari telah berupaya dengan membuat aplikasi pelaporan dan pengawasan kinerja ASN pada aplikasi e-PROKSI, selanjutnya Kota Kendari belum memiliki regulasi kebijakan tentang smart governance dan belum tertatanya penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika yang dalam hal ini belum tersedianya regulasi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelayanan komunikasi dan informatika.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja yakni kota Kendari sebagai model studikusus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell dan juga penelitian ini dibatasi hanya membahas beberapa masalah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Analisis Penerapan *Smart Governance* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga untuk kedepannya peneliti lain dapat menemukan hasil yang lebih mendalam mengenai Penegakan Peraturan Daerah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Kendari khususnya yang berkaitan dengan Analisis Penerapan *Smart Governance* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rahmadanita, Eko Budi Santoso, dan Sadu Wasistiono/ 2018. Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan *Smart city* Di Kota Bandung.
- Aplikasi (Sitasya) Sistem Pemantauan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–12.
- Giffinger et al., Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities.
- Indrawati dan Febrianta (2020). *Identification of e-governement indicators for measuring smart governance in Bandung city*